



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
NOMOR 07/ORT.07-Kpt/15/3/2022
TENTANG
RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Tim Reformasi Birokrasi berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi berkewajiban menyusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2015;
5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jambi
Pada Tanggal 16 Februari 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
Kepala Bagian Hukum dan SDM

H.M. SUBHAN



**RENCANA AKSI KERJA REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TAHUN 2022**

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PILAKSANAAN (BULAN)											KET	
					Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	
1	5 Pengembangan Sistem Manajemen SDM Merit ASN	1. Pembangunan Sistem Kinerja Individu	1 Penerapan Pengukuran Kinerja Individu	1) Seluruh pegawai memiliki Sasaran Kinerja Pegawai													6
2		2. Profesionalisme ASN	2 Penerapan assessment untuk pertimbangan pengembangan karir dan mutasi pegawai	2) Seluruh pegawai memahami indikator keberhasilan dari tugas dan jabatan (Target output/mutu/waktu/biaya)													7
3		3. Pengembangan Kinerja	3 Penerapan disiplin dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu	3) Sasaran Kinerja Pegawai mendukung Sasaran Strategis dan pencapaian kinerja secara berjenjang/Cascading													
4		4. Pengembangan Analisis Beban Kerja	4 Perencanaan kebutuhan/penambahan jumlah pegawai baik ASN maupun Non ASN menggunakan Analisa Beban Kerja (ABK)	4) Pengukuran periodik Sasaran kinerja Individu													
5		5. Pengembangan Kompetensi	5 Pengembangan pegawai berbasis kompetensi	5) Adanya evaluasi dan pelaksanaan hasil evaluasi SKP													
6		6. Implementasi Standar Kompetensi Jabatan	6 Implementasi Standar Kompetensi Jabatan	6) Penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian reward and punishment													
7		7. Pengisian Sistem Informasi Kepegawaiannya	7 Pengembangan jabatan fungsional di lingkungan unit/satuan kerja	7) Data Peserta Assessment													
8		8. Pengembangan Sistem Kinerja	8. Pengembangan jabatan fungsional di lingkungan unit/satuan kerja	8) Jumlah pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi													
9		9. Pengembangan Sistem Kinerja	9. Pengembangan jabatan fungsional di lingkungan unit/satuan kerja	9) Jumlah pegawai yang memiliki Standar Kompetensi Jabatan													
10		10. Pengembangan Sistem Kinerja	10. Pengembangan jabatan fungsional di lingkungan unit/satuan kerja	10) Data kepegawaian yang mutakhir di lingkungan unit/satuan kerja.													
11		11. Pengembangan Sistem Kinerja	11. Pengembangan jabatan fungsional di lingkungan unit/satuan kerja	11) Jumlah dan jenis jabatan fungsional yang mendukung unit dan satuan kerja													
12		12. Pengembangan Sistem Kinerja	12. Pengembangan jabatan fungsional di lingkungan unit/satuan kerja	12) Adanya identifikasi kebutuhan kompetensi di lingkungan unit kerja													
13		13. Pengembangan Sistem Kinerja	13. Pengembangan jabatan fungsional di lingkungan unit/satuan kerja	13) Jumlah pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi													
14		14. Pengembangan Sistem Kinerja	14. Pengembangan jabatan fungsional di lingkungan unit/satuan kerja	14) Setiap jabatan sudah memiliki Standar Kompetensi Jabatan													
15		15. Pengembangan Sistem Kinerja	15. Pengembangan jabatan fungsional di lingkungan unit/satuan kerja	15) Data kepegawaian yang mutakhir di lingkungan unit/satuan kerja.													
16		16. Pengembangan Sistem Kinerja	16. Pengembangan jabatan fungsional di lingkungan unit/satuan kerja	16) Jumlah dan jenis jabatan fungsional yang mendukung unit dan satuan kerja													
17		17. Pengembangan Sistem Kinerja	17. Pengembangan jabatan fungsional di lingkungan unit/satuan kerja	17) Adanya dokumentasi pengembangan kompetensi													
18		18. Pengembangan Sistem Kinerja	18. Pengembangan jabatan fungsional di lingkungan unit/satuan kerja	18) Adanya dokumentasi pengembangan kompetensi													
19		19. Pengembangan Sistem Kinerja	19. Pengembangan jabatan fungsional di lingkungan unit/satuan kerja	19) Adanya dokumentasi pengembangan kompetensi													
20		20. Pengembangan Sistem Kinerja	20. Pengembangan jabatan fungsional di lingkungan unit/satuan kerja	20) Adanya dokumentasi pengembangan kompetensi													
21		21. Pengembangan Sistem Kinerja	21. Pengembangan jabatan fungsional di lingkungan unit/satuan kerja	21) Adanya dokumentasi pengembangan kompetensi													
22		22. Pengembangan Sistem Kinerja	22. Pengembangan jabatan fungsional di lingkungan unit/satuan kerja	22) Adanya dokumentasi pengembangan kompetensi													
23		23. Pengembangan Sistem Kinerja	23. Pengembangan jabatan fungsional di lingkungan unit/satuan kerja	23) Adanya dokumentasi pengembangan kompetensi													
24		24. Pengembangan Sistem Kinerja	24. Pengembangan jabatan fungsional di lingkungan unit/satuan kerja	24) Adanya dokumentasi pengembangan kompetensi													
25		25. Pengembangan Sistem Kinerja	25. Pengembangan jabatan fungsional di lingkungan unit/satuan kerja	25) Adanya dokumentasi pengembangan kompetensi													
26		26. Pengembangan Sistem Kinerja	26. Pengembangan jabatan fungsional di lingkungan unit/satuan kerja	26) Adanya dokumentasi pengembangan kompetensi													
27		27. Pengembangan Sistem Kinerja	27. Pengembangan jabatan fungsional di lingkungan unit/satuan kerja	27) Adanya dokumentasi pengembangan kompetensi													
28		28. Pengembangan Sistem Kinerja	28. Pengembangan jabatan fungsional di lingkungan unit/satuan kerja	28) Adanya dokumentasi pengembangan kompetensi													
29		29. Pengembangan Sistem Kinerja	29. Pengembangan jabatan fungsional di lingkungan unit/satuan kerja	29) Adanya dokumentasi pengembangan kompetensi													
30		30. Pengembangan Sistem Kinerja	30. Pengembangan jabatan fungsional di lingkungan unit/satuan kerja	30) Adanya dokumentasi pengembangan kompetensi													
31		31. Pengembangan Sistem Kinerja	31. Pengembangan jabatan fungsional di lingkungan unit/satuan kerja	31) Adanya dokumentasi pengembangan kompetensi													
32		32. Pengembangan Sistem Kinerja	32. Pengembangan jabatan fungsional di lingkungan unit/satuan kerja	32) Adanya dokumentasi pengembangan kompetensi													
33		33. Pengembangan Sistem Kinerja	33. Pengembangan jabatan fungsional di lingkungan unit/satuan kerja	33) Adanya dokumentasi pengembangan kompetensi													
34		34. Pengembangan Sistem Kinerja	34. Pengembangan jabatan fungsional di lingkungan unit/satuan kerja	34) Adanya dokumentasi pengembangan kompetensi													
35		35. Pengembangan Sistem Kinerja	35. Pengembangan jabatan fungsional di lingkungan unit/satuan kerja	35) Adanya dokumentasi pengembangan kompetensi													
36		36. Pengembangan Sistem Kinerja	36. Pengembangan jabatan fungsional di lingkungan unit/satuan kerja	36) Adanya dokumentasi pengembangan kompetensi													
37		37. Pengembangan Sistem Kinerja	37. Pengembangan jabatan fungsional di lingkungan unit/satuan kerja	37) Adanya dokumentasi pengembangan kompetensi													
38		38. Pengembangan Sistem Kinerja	38. Pengembangan jabatan fungsional di lingkungan unit/satuan kerja	38) Adanya dokumentasi pengembangan kompetensi													
39		39. Pengembangan Sistem Kinerja	39. Pengembangan jabatan fungsional di lingkungan unit/satuan kerja	39) Adanya dokumentasi pengembangan kompetensi													
40		40. Pengembangan Sistem Kinerja	40. Pengembangan jabatan fungsional di lingkungan unit/satuan kerja	40) Adanya dokumentasi pengembangan kompetensi													
41		41. Pengembangan Sistem Kinerja	41. Pengembangan jabatan fungsional di lingkungan unit/satuan kerja	41) Adanya dokumentasi pengembangan kompetensi													
42		42. Pengembangan Sistem Kinerja	42. Pengembangan jabatan fungsional di lingkungan unit/satuan kerja	42) Adanya dokumentasi pengembangan kompetensi													
43		43. Pengembangan Sistem Kinerja	43. Pengembangan jabatan fungsional di lingkungan unit/satuan kerja	43) Adanya dokumentasi pengembangan kompetensi													
44		44. Pengembangan Sistem Kinerja	44. Pengembangan jabatan fungsional di lingkungan unit/satuan kerja	44) Adanya dokumentasi pengembangan kompetensi													
45		45. Pengembangan Sistem Kinerja	45. Pengembangan jabatan fungsional di lingkungan unit/satuan kerja	45) Adanya dokumentasi pengembangan kompetensi													
46		46. Pengembangan Sistem Kinerja	46. Pengembangan jabatan fungsional di lingkungan unit/satuan kerja	46) Adanya dokumentasi pengembangan kompetensi													
47		47. Pengembangan Sistem Kinerja	47. Pengembangan jabatan fungsional di lingkungan unit/satuan kerja	47) Adanya dokumentasi pengembangan kompetensi													
48		48. Pengembangan Sistem Kinerja	48. Pengembangan jabatan fungsional di lingkungan unit/satuan kerja	48) Adanya dokumentasi pengembangan kompetensi													
49		49. Pengembangan Sistem Kinerja	49. Pengembangan jabatan fungsional di lingkungan unit/satuan kerja	49) Adanya dokumentasi pengembangan kompetensi													
50		50. Pengembangan Sistem Kinerja	50. Pengembangan jabatan fungsional di lingkungan unit/satuan kerja	50) Adanya dokumentasi pengembangan kompetensi													
51		51. Pengembangan Sistem Kinerja	51. Pengembangan jabatan fungsional di lingkungan unit/satuan kerja	51) Adanya dokumentasi pengembangan kompetensi													
52		52. Pengembangan Sistem Kinerja	52. Pengembangan jabatan fungsional di lingkungan unit/satuan kerja	52) Adanya dokumentasi pengembangan kompetensi													
53		53. Pengembangan Sistem Kinerja	53. Pengembangan jabatan fungsional di lingkungan unit/satuan kerja	53) Adanya dokumentasi pengembangan kompetensi													
54		54. Pengembangan Sistem Kinerja	54. Pengembangan jabatan fungsional di lingkungan unit/satuan kerja	54) Adanya dokumentasi pengembangan kompetensi													
55		55. Pengembangan Sistem Kinerja	55. Pengembangan jabatan fungsional di lingkungan unit/satuan kerja	55) Adanya dokumentasi pengembangan kompetensi													
56		56. Pengembangan Sistem Kinerja	56. Pengembangan jabatan fungsional di lingkungan unit/satuan kerja	56) Adanya dokumentasi pengembangan kompetensi													
57		57. Pengembangan Sistem Kinerja	57. Pengembangan jabatan fungsional di lingkungan unit/satuan kerja	57) Adanya dokumentasi pengembangan kompetensi													
58		58. Pengembangan Sistem Kinerja	58. Pengembangan jabatan fungsional di lingkungan unit/satuan kerja	58) Adanya dokumentasi pengembangan kompetensi													
59		59. Pengembangan Sistem Kinerja	59. Pengembangan jabatan fungsional di lingkungan unit/satuan kerja	59) Adanya dokumentasi pengembangan kompetensi													
60		60. Pengembangan Sistem Kinerja	60. Pengembangan jabatan fungsional di lingkungan unit/satuan kerja	60) Adanya dokumentasi pengembangan kompetensi													
61		61. Pengembangan Sistem Kinerja	61. Pengembangan jabatan fungsional di lingkungan unit/satuan kerja	61) Adanya dokumentasi pengembangan kompetensi													
62		62. Pengembangan Sistem Kinerja	62. Pengembangan jabatan fungsional di lingkungan unit/satuan kerja	62) Adanya dokumentasi pengembangan kompetensi													
63		63. Pengembangan Sistem Kinerja	63. Pengembangan jabatan fungsional di lingkungan unit/satuan kerja	63) Adanya dokumentasi pengembangan kompetensi													
64		64. Pengembangan Sistem Kinerja	64. Pengembangan jabatan fungsional di lingkungan unit/satuan kerja	64) Adanya dokumentasi pengembangan kompetensi													
65		65. Pengembangan Sistem Kinerja	65. Pengembangan jabatan fungsional di lingkungan unit/satuan kerja	65) Adanya dokumentasi pengembangan kompetensi													
66		66. Pengembangan Sistem Kinerja	66. Pengembangan jabatan fungsional di lingkungan unit/satuan kerja	66) Adanya dokumentasi pengembangan kompetensi													
67		67. Pengembangan Sistem Kinerja	67. Pengembangan jabatan fungsional di lingkungan unit/satuan kerja	67) Adanya dokumentasi pengembangan kompetensi													
68		68. Pengembangan Sistem Kinerja	68. Pengembangan jabatan fungsional di lingkungan unit/satuan kerja	68) Adanya dokumentasi pengembangan kompetensi													
69		69. Pengembangan Sistem Kinerja	69. Pengembangan jabatan fungsional di lingkungan unit/satuan kerja	69) Adanya dokumentasi pengembangan kompetensi													
70		70. Pengembangan Sistem Kinerja	70. Pengembangan jabatan fungsional di lingkungan unit/satuan kerja	70) Adanya dokumentasi pengembangan kompetensi													
71		71. Pengembangan Sistem Kinerja	71. Pengembangan jabatan fungsional di lingkungan unit/satuan kerja	71) Adanya dokumentasi pengembangan kompetensi													
72		72. Pengembangan Sistem Kinerja	72. Pengembangan jabatan fungsional di lingkungan unit/satuan kerja	72) Adanya dokumentasi pengembangan kompetensi													
73		73. Pengembangan Sistem Kinerja	73. Pengembangan jabatan fungsional di lingkungan unit/satuan kerja	73) Adanya dokumentasi pengembangan kompetensi													
74		74. Pengembangan Sistem Kinerja	74. Pengembangan jabatan fungsional di lingkungan unit/satuan kerja	74													

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)											KET
					Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				5. Pelayanan khusus kepada: 1) Ketersediaan sarana khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus (ruang menyusui, jalur kursi roda, toilet khusus, dll) 2) Ketersediaan pelayanan khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus	5. Tersedianya pelayanan khusus berupa sarana dan layanan											
				6. Pengelolahan Pengaduan 1) Ketersediaan sarana pengaduan 2) Ketersedian informasi prosedur dan tata cara penyampaian aduan 3) Ketersediaan pengelola aduan	6. Tersedianya sarana pengaduan berikut prosedur, petugas dan dokumentasi pengaduan											
				7. Penilaian kinerja berupa sarana pengukuran kepuasan langganan dan survei/pelayanan	7. Tersedianya survei dan sarana pengukuran kinerja serta indeks hasil pengolahannya											
				8. Visi, Misi dan Motto Pelayanan: 1) Ketersedian visi dan misi pelayanan 2) Ketersedian moto pelayanan	8. Tersedianya visi, misi dan moto pelayanan											
				9. Atribut Pelayanan: 1) berupa kartu identitas petugas 2) Kartu tamu 3) Buku tamu 4) Petunjuk arah ruang layanan	9. Atribut layanan dapat terlihat publik											
				10. Pelayanan terpadu satu pintu.	10. Tersedianya pelayanan satu pintu di lingkungan unit/satuan kerja											
				4. Penerapan partisipasi publik dalam pelayanan												
				1. Pembangunan Kerja Sama 2. Pelibatan masyarakat dalam kegiatan pemilu												
				5. Penerapan reward and punishment dalam penyelenggaraan pelayanan publik	Pembangunan dan pelaksanaan reward dan punishment dalam penyelenggaraan pelayanan publik	Adanya pemberian reward dan punishment dalam penyelenggaraan pelayanan publik										

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
Kepala Bagian Hukum dan SDM

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 6 Februari 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
ttd
H.M. SUBHAN



Dian Agustini